

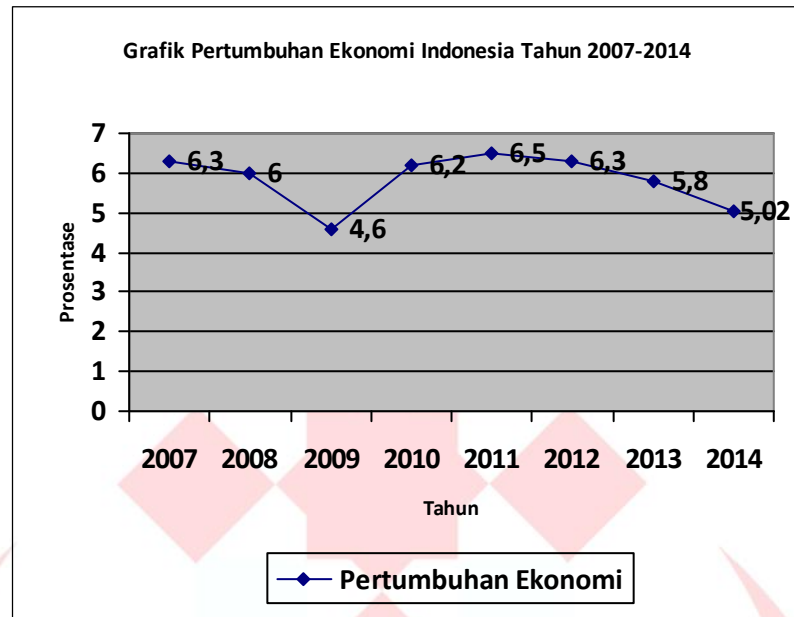
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi global tahun 2008 yang melanda Amerika Serikat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut secara keseluruhan tumbuh mencapai 6% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3% (Purna, Hamidi, dan Prima, 2009). Meski demikian, sejak tahun 2008 hingga saat ini, dimana negara-negara yang terkena dampak krisis masih mengalami pemulihan pasca krisis, Indonesia dapat membuktikan kemampuannya dalam bertahan menghadapi krisis ekonomi.

Hal tersebut dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif (ekonomi.kompasiana.com). Pada tahun 2009, perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,6%, namun di tahun 2010 dan 2011 mampu tumbuh cukup tinggi 6,2% dan 6,5%, serta masih dapat bertahan di level 6,3% pada tahun 2012. Akan tetapi di tahun 2013 dan 2014 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,8% dan 5,02% melambat dibanding tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2014).



Sumber : diolah dari data BPS tahun 2014 (www.bps.go.id)

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007 - 2014

Salah satu penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor non migas dan penyerapan tenaga kerja. Disaat Banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM justru mampu bertahan dan dapat menyelamatkan para pengangguran akibat PHK untuk dapat bekerja dan berkarya kembali. UMKM dapat menyerap sebesar 97% tenaga kerja di Indonesia, terutama dalam mikro ekonomi yang mencapai hampir 95% tenaga kerja. Selain itu, kontribusi UMKM dalam PDB juga mencapai 4.303 triliun pertahun (ekonomi.kompasiana.com).

UMKM hingga saat ini telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya yang begitu pesat. UMKM juga turut serta menjadi penyumbang kemajuan dalam mengembangkan dunia ekonomi dan industri dalam negeri. Meskipun demikian, masih banyak yang melihat UMKM dengan sebelah mata. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM maka UMKM mendapatkan jaminan dan keadilan usaha. Pemberlakuan undang-undang ini telah meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam memajukan perekonomian, pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentu saja akan berdampak pada pengentasan kemiskinan (Alfitri *et al*, 2014).

Menurut Narsa *et al* (2012), UMKM menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi negara. Hal ini dapat dicermati dari keunggulan UMKM, yakni: (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibanding sektor bisnis lainnya, (c) memiliki diversiasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah unit UMKM mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2011 mencapai 55,2 juta unit usaha dan tahun 2012 mencapai 56,5 juta unit usaha. Menurut data dari

Badan Pusat Statistik, industri skala mikro dan kecil di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3,5 juta. UMKM di Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tercatat hingga akhir tahun 2014 terdapat 99.681 unit usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah meningkat sekitar 10,34% dari tahun 2013.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014
(<http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id>)

Gambar 1.2. Grafik Jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia telah meluncurkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009. SAK ETAP ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan penyederhanaan dari SAK Umum yang sangat kompleks. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi *standar overload*, dimana SAK yang sudah ada sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM (Wahdini dan Suhairi, 2006).

Sudah 4 tahun semenjak diberlakukannya SAK ETAP, namun UMKM masih belum menerapkan standar tersebut. SAK ETAP sudah diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki pertanggungjawaban laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Suintri, 2013; dan Fitakurrokhmah, 2013). Meskipun SAK ETAP ditujukan untuk UMKM, penerapannya masih belum dilaksanakan (Sagala, 2010; Narsa *et al*, 2012 dan Alfritri *et al*, 2014).

Di wilayah Kabupaten Brebes, UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun pelatihan mengenai SAK ETAP dari Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat Kabupaten. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten brebes. Pelatihan-pelatihan lebih sering dilaksanakan di tingkat provinsi dan tidak semua UMKM di Kabupaten Brebes mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, tidak ada laporan dari UMKM atas laporan keuangannya, sehingga tidak ada data tertulis di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes mengenai laporan keuangan yang dibuat UMKM apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak.

Beberapa faktor yang menyebabkan praktik akuntansi yang sesuai standar pada UMKM masih rendah diantaranya yaitu persepsi terhadap urgensi keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM, pengetahuan akuntansi pemilik UMKM, dan pertimbangan biaya-manfaat (*cost-effectiveness*) bagi UMKM. Kebutuhan akan catatan akuntansi yang memadai dianggap membuang waktu dan biaya, yang penting menurut mereka adalah

mendapatkan laba tanpa direpoti penyelenggaraan akuntansi. Pelaku UMKM menganggap bahwa manfaat yang diperoleh atas informasi akuntansi lebih kecil dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan ketika menyelenggarakan praktik akuntansi secara tepat. Selain itu, tidak terselenggaranya praktik akuntansi juga disebabkan oleh peran serta pemerintah dan akuntan yang belum optimal dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di UMKM (Sixpria *et al*, 2013).

Pertumbuhan jumlah unit UMKM hingga kini tidak diikuti dengan kemampuan UMKM dalam menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan SAK ETAP. Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan tentang jumlah dana yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, keluar masuknya barang dan jumlah utang atau piutang yang dimiliki. Pencatatan yang seperti itu tidak dapat membantu mereka dalam mendapatkan akses modal atau akses kredit ke Bank.

Sixpria *et al* (2013) juga menyebutkan bahwa praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia masih rendah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal (Hutagaol, 2012 dalam Tuti, 2014), yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, pertimbangan biaya-manfaat bagi UMKM, ukuran UMKM, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting

dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit sehingga tidak ada pemisah antara dana pribadi dan dana yang digunakan untuk proses bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Musyafa'ah (2013) menunjukkan hasil terdapat kecenderungan jenis UMKM dan koperasi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP. Namun UMKM dan koperasi masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Pada dasarnya, SAK ETAP bertujuan untuk dapat mengakomodir kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan karena sifatnya yang lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan SAK Umum. Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa hal terpenting dari implementasi SAK ETAP adalah pemahaman yang baik atas SAK ETAP oleh UMKM. Pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK ETAP berkaitan dengan informasi dan sosialisasi yang diterima UMKM, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, umur perusahaan dan ukuran usaha.

Informasi dan sosialisasi yang diperoleh pengusaha akan meningkatkan pemahaman mereka terkait SAK ETAP. Sosialisasi dapat juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan tersebut akan menghasilkan peningkatan profesional yang lebih jauh dalam manajemen. Masitoh (2014) menemukan bahwa sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Selain itu, pengaruhnya terhadap pemahaman SAK ETAP ditunjukkan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) dan Zahri (2014) bahwa pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif dan

berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK ETAP.

Latar belakang pengusaha UMKM dapat mempengaruhi pemahaman SAK ETAP. Pengetahuan mengenai akuntansi dan kegunaan dari laporan keuangannya didapatkan oleh seseorang yang menempuh pendidikan jurusan akuntansi. Latar belakang pendidikan seseorang dapat membuat praktik penggunaan akuntansi menjadi lebih penting bagi perusahaan, karena mereka lebih dapat mengetahui ilmu dan kegunaan informasi tersebut daripada seseorang yang mempunyai pendidikan diluar akuntansi/ekonomi (Aufar, 2013). Pengusaha/manajer tentunya akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi. Sedangkan menurut Rudiantoro dan Siregar (2012), latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK ETAP.

Jenjang pendidikan seorang pengusaha/manajer juga akan mempengaruhi pola pikir mereka. Jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai, karena materi akuntansi didapatkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Zahri, 2014; dan Wahyudi, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Zahro dan Wahyundaru (2015) menunjukkan bahwa pendidikan pemilik UMKM berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP.

Umur usaha yang semakin panjang berhubungan dengan proses pembukuan yang lebih teratur sehingga akan mempunyai persepsi yang lebih baik mengenai SAK ETAP. Salah satu hasil penelitian dalam Rudiantoro dan

Siregar (2012) menemukan adanya hubungan positif antara umur usaha UMKM dengan frekuensi melakukan pembukuan secara teratur. Penelitian yang dilakukan oleh Wulanditya dan Supriyati (2012), Zahri (2014) dan Tuti (2014) menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Lama usaha UMKM dapat menunjukkan pengalaman yang dimiliki UMKM selama umur usahanya.

Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan, sehingga diharapkan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai SAK ETAP (Zahro dan Wahyundaru, 2015). Penelitian Aufar (2013) menunjukkan bahwa skala usaha berpengaruh signifikan terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha di saat semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, maka pengusaha mulai memandang pentingnya kebutuhan laporan keuangan yang sesuai standar. Hasil penelitian Zahro dan Wahyundaru (2015) menemukan skala usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM. Wulanditya dan Supriyati (2012) juga menemukan bahwa ukuran usaha berpengaruh signifikan terhadap pemahaman SAK ETAP.

Dengan adanya SAK ETAP, UMKM sebenarnya akan dimudahkan dalam proses pembukuan akuntansi karena banyak *software* akuntansi yang bisa digunakan UMKM. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga akan lebih mudah dalam memperoleh sumber dana baru bagi

perusahaan baik kredit perbankan ataupun para investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Studi fenomenologi yang dilakukan oleh Nuradilla *et al* (2014) terkait peran laporan keuangan dalam memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan bahwa banyak pemilik usaha yang belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Meskipun demikian, kita dapat memahami peran laporan keuangan yang sesuai standar akan dapat memudahkan pemilik dalam memperoleh kredit.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk dapat bersaing di level nasional maupun internasional. Sofiah dan Murniati (2014) juga mengharapkan SAK ETAP akan dapat menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kabupaten Brebes berdasarkan pemahaman pengusaha/pemilik UMKM atas SAK ETAP tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah informasi dan sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP?

2. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP?
3. Apakah jenjang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP?
5. Apakah ukuran usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenjang pendidikan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran usaha terhadap pemahaman pengusaha/pemilik UMKM terkait SAK ETAP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi, yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pentingnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penerapan SAK ETAP pada UMKM.
- b. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya